

H.UDI MUFRODI MAWARDI, M.A

KEMAL ATATURK: PEMBAHARUANNYA

I. PENDAHULUAN

Mustafa Kemal, seorang tokoh pembaharuan Turki yang memulai karirnya dari bawah, yaitu ketika perang dunia pertama berlangsung. Pada waktu itu, ia sebagai perwira tentara kesultanan Ottoman yang berkuasa di Turki bertekad untuk menyelamatkan bangsanya dari cengkeraman penjajah seperti Perancis, Amerika, Inggris, dan Yunani. Ia mengobarkan semangat patriotisme rakyat Turki untuk bangkit kembali merebut kemerdekaan. Di Medan pertempuran, ia menunjukkan keberanian dan kecakapannya terutama di daerah Gallipoli dan daerah Kaukasus.

Sebagai penghargaan terhadap kecakapannya dalam medan pertempuran, ia dinaikkan pangkatnya dari Kolonel menjadi Jenderal ditambah dengan gelar Pasya. Sehabis perang dunia I ia diangkat menjadi Panglima dari semua pasukan yang ada di Turki Selatan. Kemudian, ia membebaskan Izmir, dan Smyrna yang telah jatuh di tangan Tentara Sekutu. Dengan mendapat sokongan rakyat yang telah mulai membentuk gerakan-gerakan membela tanah air, ia akhirnya dapat memukul musuh mundur dan menyelamatkan daerah Turki dari penjajahan asing.

Pada tanggal 23 Oktober 1923, Turki mengalami Proklamasi sebagai negara Republik dan Mustafa Kemal terpilih menjadi Presiden yang pertama. Selanjutnya, ia terpilih kembali sampai empat kali menjadi Presiden, yaitu pada tanggal 1 Nopember 1927, tanggal 4 Mei 1931, dan tanggal 1 Maret 1935. Dan pada tanggal 10 Nopember 1938 ia meninggal dunia karena sakit.

Sejak menjadi orang yang berkuasa di Turki, Mustafa Kemal yang kemudian lebih populer dengan nama Ataturk, artinya Bapak Turki, mulai memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebarkan dan mewujudkan ide sekularisasinya. Ia bercita-cita ingin mengangkat bangsanya mencapai kemajuan dengan menjadikan bangsa Barat sebagai model modernisasi.

II. USAHA PEMBAHARUANNYA

Untuk mewujudkan Turki sebagai negara maju dan ber peradaban Barat, langkah pertama yang dilakukan dalam pembaharuannya adalah mengenai bentuk negara, Mustafa Kemal menghendaki adanya pemisahan antara agama dan negara.¹ Agama hanya memainkan peranan sekunder dan hanya

sebagai nilai personal.² Kedaulatan terletak di tangan rakyat, bukan di tangan Sultan dan Khalifah.³

Ide sekularisasi yang dijalankan Mustafa Kemal memang tidak sampai menghilangkan agama. Sekularisasinya berpusat pada kekuasaan golongan ulama dalam soal negara dan soal politik. Ia melarang pembentukan partai yang berdasarkan agama, seperti Partai Islam, Partai Kristen. Yang terutama ditentangnya ialah ide negara Islam dan pembentukan negara Islam. Institusi-institusi negara, sosial, ekonomi, hukum, politik, dan pendidikan harus dibebaskan dari kekuasaan syariat. Negara dalam pada itu, menjamin kebebasan beragama bagi rakyat.⁴

Menurut Alexander H. de Groot, revolusi yang dilakukan Mustafa Kemal bukan suatu gejolak sosial dengan kekerasan dan juga bukan penggantian suatu kelas sosial dengan kelas sosial lainnya, tetapi merupakan revolusi nilai-nilai. Gerakan ini bertujuan mengganti Islam sebagai sistem normatif dan resmi dengan apa yang disebut nilai-nilai Eropa modern. Hal ini berarti penggantian sistem ketanegaraan Kekaisaran Ottoman yang

bersifat Islam tradisional dengan sistem berideologi modern.⁵

Serif Mardin berpendapat bahwa konsep negara modern yang diajukan Mustafa Kemal, bertujuan untuk menjaga negara agar selalu bebas dari pengaruh ulama dan pemimpin tarekat.⁶

Kelihatannya nilai-nilai agama dipandang oleh Kemal sebagai penghambat kemajuan. Sekularisasi yang dilakukannya diharapkan dapat menghindarkan rakyat Turki dari nilai-nilai yang statis dan menjadikan rakyat Turki yang dinamis dan maju seperti Barat.

Kemajuan bangsa Barat nampaknya benar-benar merupakan idaman bagi Mustafa Kemal. Ia mempunyai pendapat bahwa Turki dapat maju hanya dengan meniru Barat. Setelah perjuangan kemerdekaan selesai, harus memulai perjuangan baru untuk memperoleh dan mewujudkan peradaban Barat di Turki. Peradaban Barat yang diambil bukan hanya sabahagian-sebahagian, tetapi dalam keseluruhannya.⁷ Masyarakat Turki harus menjadi masyarakat yang mempunyai peradaban Barat.⁸

Pendapat di atas mungkin bertolak

- 1 Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991, h. 149.
- 2 Harun Nasution, Azyumardi Azra (ed.), *Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985, h. 225.
- 3 Harun Nasution, *Loc. Cit.*
- 4 Harun Nasution, *op. cit.*, h. 153.
- 5 W.A.L.Stokhof, N.J.G., *Beberapa Kajian Indonesia dan Islam*, Jakarta: INIS, 1990, h.223.
- 6 Harun Nasution, Azyumardi Azra (ed.), *loc. cit.*
- 7 Harun Nasution, *op. cit.*, h. 147.
- 8 *Ibid.* h. 148.

dari kenyataan bahwa kemajuan yang dicapai dunia Barat sangat besar. Sementara itu dunia Islam dalam keadaan statis dan terbelakang. Sehingga Atatürk terdorong untuk menjadikan dunia Barat sebagai model pembaharuannya.

Penikiran pembaharuan Mustafa Kemal dibangun di atas dasar wasteralisme, sekularisasi, dan nasionalisme.⁹ Ketiga dasar penikiran inilah yang dijadikan acuan dalam usaha pembaharuannya di bidang politik, hukum, pendidikan dan ekonomi.

1. Politik

Realisasi dari prinsip dasar pemikirannya, Mustafa Kemal membentuk suatu negara baru yang disebut negara Republik dan ibukotanya Ankara. Ia sendiri yang ditunjuk sebagai Presiden dan Ismet sebagai Perdana Menteri.¹⁰ Kemudian ia membentuk Majelis Nasional Agung dan dalam sidang perdananya ditetapkan beberapa keputusan sebagai berikut:

- a. Kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat Turki.
- b. Majelis Nasional Agung merupakan perwakilan rakyat tertinggi.
- c. Majelis Nasional Agung bertugas sebagai badan legislatif dan badan eksekutif.
- d. Majelis Negara yang anggotanya

dipilih dari Majelis Nasional Agung akan menjalankan tugas pemerintah.

- e. Ketua Majelis Nasional Agung merangkap jabatan Ketua Majelis Negara.¹¹

Lima butir keputusan tersebut di atas memberikan gambaran bahwa konstitusi yang dimajukan Mustafa Kemal merupakan bentuk baru dan berbeda dengan pemikiran elite birokrat tradisional yang kedaulatannya terletak di tangan Sultan dan Khalifah.

Alexander H. de Groot memandang bentuk negara baru itu sebagai negara Republik yang berdasarkan nasionalisme Atatürk, kedaulatan rakyat Turki, dan nilai-nilai Turki.¹² Pendapat ini sesuai dengan pernyataan Harun Nasution bahwa ide nasionalisme yang dimajukan Atatürk sangat terbatas daerah geografinya. Di dalam Piagam Nasional tahun 1920, disebut antara lain bahwa Turki melepaskan tuntutan teritorial terhadap daerah-daerah yang dahulu terletak di bawah kekuasaan kerajaan Usmani, kecuali daerah yang di dalamnya terdapat mayoritas Turki. Di dalam salah satu pidatonya, ia menjelaskan bahwa kaum nasionalis akan bekerja hanya dalam lingkungan daerah teritorial Turki untuk kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat Turki.¹³ Dengan

9 Ibid., h. 149.

10 Bernard Lewis, *The Emergence of Modern Turkey*, New York: Oxford University Press, 1961, h. 276.

11 Harun Nasution, op.cit., h. 147.

12 W.A.L. Stokhof, N.J.G., op. cit. h. 225.

13 Harun Nasution, op. cit., h. 148-149.

demikian, tidaklah salah kalau Stoddard mengatakan bahwa tujuan bangsa Turki dalam nasiohalismenya adalah menturkikan segala-galanya agar menjadi bangsa Turki yang berbahasa satu, herbudaya satu, dan dijiwai oleh semangat patriotik Turki.¹⁴

Semenjak terbentuknya negara Republik inilah Mustafa Kemal mengambil alih semua jabatan-jabatan strategik dan membebaskan pengaruh-pengaruh agama di dalamnya.¹⁵ Namun, sebagai yang telah dijelaskan bahwa Mustafa Kemal tidak sampai menghilangkan agama. Negara masih memainkan peranan kunci dalam kontrol agama melalui Direktorat Jenderal Urusan Keagamaan, suatu lembaga yang berada di bawah wewenang Perdana Menteri.¹⁶ Jadi, benar apa yang dikatakan Harun Nasution bahwa negara yang baru lahir ini belumlah negara sekuler, sebagai yang terkandung, dalam Konstitusi 1921 bahwa Turki adalah negara Republik dan agama negara adalah Islam.¹⁷ Adapun bentuk negara yang sekuler adalah merupakan perkembangan yang selanjutnya.

Setelah negara Republik terbentuk,

di Turki terdapat dualisme dalam pemegang kekuasaan duniawi, yaitu Raja Turki di satu pihak dan Majelis Negara di pihak lain.¹⁸ Untuk menghindari Turki dari dualisme pemerintahan, langkah pertama yang ditempuh oleh Mustafa Kemal adalah menghapuskan lembaga kesultanan pada bulan Nopember 1922.¹⁹ Selain itu, ada tendensi lain dalam penghapusan jabatan Sultan ini, yaitu karena Sultan di Istanbul masih dianggap oleh sekutu sebagai penguasa satu-satunya, padahal Sultan itu sudah tidak berkuasa lagi.²⁰

Dengan dihapuskannya jabatan Sultan, sudah barang tentu semua institusi yang berada di bawah kekuasaannya kehilangan fungsi strukturalnya, salah satu di antaranya adalah Syaikh al-Islam. Biro ini dihapuskan pada tahun 1924 M.²¹ dan kemudian diganti dengan Kamenterian Syari'at yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden.²² Sebagai yang dikatakan Harun Nasution bahwa Kamenterian ini di zaman Kerajaan Usmani tidak ada.²³ Jadi, jelaslah bahwa Turki diperintah oleh seorang Presiden dengan sebuah konstitusi.

14 L. Stoddard, *Dunia Baru Islam*, Jakarta: Tpn., 1966, h. 144.

15 James P. Piscatori (ed.), *Islam in the Political Process*, London: Cambridge University Press, 1986, p. 142.

16 Harun Nasution, Azyumardi Azra (ed.), *Op. cit.*, h. 226.

17 Harun Nasution, *op. cit.*, h. 150.

18 *Ibid.*

19 W.A.L. Stokhof, N.J.G., *loc. cit.*

20 Harun Nasution, *op. cit.*, h. 149.

21 *Ibid.*, h. 151.

22 Bernard Lewis, *op. cit.*, h. 260.

23 Harun Nasution, *loc. cit.*

Salah satu pasal dari konstitusi tersebut adalah: "Kedaulatan berada di tangan bangsa tanpa syarat. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh wakil-wakil dalam sidang Majelis Nasional Agung. Pemerintahan didasarkan atas pemerintahan rakyat yang langsung menentukan nasib mereka sendiri".²⁴ Dengan demikian, Turki akan terhindar dari kekuasaan dan sistem pemerintahan yang absolut.

Setelah jabatan Sultan dihapuskan, berarti masih ada satu jabatan lagi, yaitu jabatan Khalifah yang pada waktu itu dipegang oleh Abd al-Majid. Namun, Khalifah tidak mempunyai kekuasaan duniawi, yang ada hanyalah kekuasaan spiritual.²⁵ Oleh karena itu, di Turki tidak lagi terjadi dualisme dalam pemegang kekuasaan duniawi.

Sungguhpun demikian, dalam kenyataannya kedudukan Khalifah masih diberi pengertian oleh golongan Islam sebagai Kepala Negara. Mereka mempertahankan adanya Khalifah dan memperkuat kedudukannya, sehingga ia tetap bertindak sebagai Raja Usmani sebelumnya, menerima wakil-wakil dari luar negeri, mengirim wakil-wakil ke luar negeri, mengadakan prosesi kebesaran pada hari Jum'at ke mesjid untuk sembahyang, dan tetap tinggal

di Istana Istanbul.²⁶

Mengenai eksistensi lembaga kehilafahan di Turki memang terjadi suatu perdebatan sengit antara dua golongan yang masing-masing mempertahankan perinsipnya, yaitu golongan Islam dan golongan nasionalis. Akan tetapi, akhirnya pada tahun 1924 jabatan Khalifah yang merupakan penguasa spiritual dan politik tertinggi yang berkuasa selama berabad-abad di kesultanan Turki dihapuskan oleh Mustafa Kemal.²⁷ Kemudian, Khalifah Abd al-Majid diperintahkan meninggalkan Turki, dan ia bersama keluarganya pergi ke Swiss.²⁸

Sebagai reaksi terhadap penghapusan kedua jabatan tersebut di atas, muncul suatu golongan oposisi yang diatur oleh kelompok mistik dan kelompok agama yang diorganisasikan menurut garis-garis tarekat.²⁹ Mereka mengadakan kegiatan bawah tanah untuk melawan Ataturk.³⁰ Kelompok mistik itu, diantaranya adalah Bektasiah, Naqsabandiah, Qadiriah, dan Maulawiah.³¹

Oleh karena itu, pada tahun 1925 aliran-aliran keagamaan dan tarekat-tarekat dibubarkan, begitu juga tempat-tempat pertemuan mereka,

24 Bernard Lewis, *loc. cit.*, lihat pula W.A.L. Stokhof, N.J.G., *op. cit.*, h. 224.

25 Harun Nasution, *op. cit.*, h. 150.

26 *Ibid.*, h. 151.

27 G.H. Jansen, *Islam Militan*, Bandung: Pustakat, 1983, h. 162.

28 Harun Nasution, *loc. cit.*

29 W.A.L. Stokhof, N.J.G., *op. cit.*, h. 230.

30 G.H. Jansen, *op. cit.* h. 167.

31 *Ibid.*

Tekke, dan makam-makam ditutup.³² Kelihatannya hal ini merupakan jalan yang terbaik bagi Mustafa Kemal, karena kelompok-kelompok mistik itu dipandang sebagai penghalang terhadap langkah-langkah kelompok nasionalis.

2. Hukum dan Pendidikan

Sebagai kelanjutan dari usaha sekularisasinya, Kemal Atatürk menghapuskan Kementerian Urusan Syari'at yang semula dibentuk sebagai pengganti Biro Syaikh al-Islam.³³ Kemudian, pada tahun 1926 hukum syari'at diganti oleh undang-undang sipil yang diambil dari undang-undang Swiss.³⁴ Perkawinan dilakukan bukan lagi menurut syari'at, tetapi harus menurut hukum sipil. Wanita mendapat hak cerai yang sama dengan kaum pria. Selanjutnya, diadakan hukum baru seperti hukum dagang, hukum pidana, hukum laut, dan hukum obligasi. Semuanya diambil dari hukum Barat.³⁵

Serif Mardin menyatakan bahwa dihapuskannya Kementerian Syari'at ini bertujuan untuk mempermudah usaha Mustafa Kemal dalam menghilangkan artikel 2 dari Konstitusi 1921 yang menjadikan Islam sebagai agama

negara.³⁶ Artikel ini, dipandang oleh Kemal sebagai hal yang mengaburkan ide kedaulatan rakyat, karena kalau artikel ini masih tetap ada berarti kedaulatan bukan sepenuhnya terletak di tangan rakyat, tetapi pada syari'at.³⁷ Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai ide kedaulatan rakyat, pada tahun 1928 Islam tidak lagi menjadi agama negara.³⁸ Sembilan tahun kemudian, yaitu sesudah, prinsip sekularisme dimasukkan ke dalam konstitusi di tahun 1937, barulah Republik Turki dengan resmi menjadi negara sekuler.³⁹

Usaha penghapusan jabatan Sultan, Khalifah, dan Kementerian Syari'at ini dapatlah dipahami bahwa Mustafa Kemal sebenarnya menginginkan adanya penguasa tunggal yang sekularis, nasionalis, dan westernis. Ia mungkin menyadari bahwa semua cita-citanya akan terwujud hanya dengan cara bertahap dalam melakukan perubahan-perubahan, sebagai terlihat dalam langkah-langkah selanjutnya. Sehingga samasekali tidak ada keterkaitan antara agama dan negara.

Pembaharuan selanjutnya yang dilakukan oleh Mustafa Kemal adalah masalah pendidikan. Pada tanggal 7

32 *Ibid.* h. 162.

33 W.A.L. Stokhof, N.J.G., *op. cit.*, h. 225.

34 G.H. Jansen, *loc. cit.*

35 Harun Nasution, *op. cit.*, h. 152.

36 Harun Nasution, Azyumardi Azra (ed.), *loc. cit.*

37 Harun Nasution, *op. cit.*, h. 151.

38 W.A.L. Stokhof, N.J.G. *op. cit.* h. 224.

39 Harun Nasution, *loc. cit.*

Pebruari 1924 dikeluarkan dekrit untuk membersihkan semua sekolah asing, dari unsur keagamaan. Pada tanggal 1 Maret 1924 ketetapan penyatuan pendidikan diterima, yaitu menghapuskan semua bentuk pengawasan yang dilakukan oleh badan-badan Islam terhadap sekolah-sekolah.⁴⁰ Seluruh sekolah diletakkan di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan. Selanjutnya, pendidikan agama di-tiadakan di sekolah-sekolah, di daerah perkotaan pada tahun 1930 dan di daerah pedesaan pada tahun 1933.⁴¹ Pendidikan agama menjadi tanggungjawab orang tua. Pada tahun 1931 lembaga-lembaga pendidikan imam dan khatib ditutup, dan pada tahun 1933 Fakultas Teologi di Istanbul juga ditutup.⁴² Pelajaran bahasa Arab dan Persia yang terdapat dalam kurikulum sekolah sebelumnya dihapuskan pada tahun 1928. Di tahun ini juga tulisan Arab ditukar dengan tulisan latin.⁴³

Undang-undang penyatuan pendidikan ini kelihatannya diharapkan oleh Mustafa Kemal dapat menghindarkan pemerintahannya dari campur tangan kelompok tradisional. Ada kemungkinan ia berprinsip bahwa cita-citanya akan dapat terwujud hanyalah dengan tampilnya kelompok modern dalam

tubuh pemerintahan secara keseluruhan.

Namun demikian, pada tahun 1946 partai Republik melihat bahwa gerakan ekstrim Islam mungkin akan memanfaatkan isu kebebasan pendidikan agama untuk bahan kampanye yang berhasil. Oleh karena itu, partai Republik memutuskan untuk mengadakan langkah oposisi dengan mendirikan sekolah untuk membina para imam dan khatib pada tahun 1948. Pada tahun 1949 di Universitas Ankara dibuka Fakultas Teologi (Fakultas Hahiyat).⁴⁴ Pendidikan agama dimasukkan kembali ke dalam kurikulum sekolah selama dua jam seminggu. Setahun kemudian pendidikan agama itu dibuat bersifat wajib. Imam-imam tentara mulai bertugas di Angkatan Bersenjata Turki. Majallah-majallah Islam mulai muncul seperti Sebil-ur-Resad dan Selamat. Ensiklopedi Islam juga diterjemahkan ke dalam bahasa Turki. Orang-orang Turki telah dibolehlkan naik haji ke Mekah,⁴⁵ sehingga jumlah umat Islam yang pergi haji lebih banyak daripada sebelumnya. Pada tahun 1938 ada seratus jemaah, pada tahun 1952 lebih dari 10.000 jemaah, dan pada 1970 hampir mencapai 50.000 jemaah.⁴⁶

40 W.A.L.Stokhof, N.J.G., *op. cit.* h. 225.

41 Harun Nasution, *op. cit.* h. 152.

42 Munawir Syazali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990. h. 226.

43 Harun Nasution, *loc. cit.*

44 Fazlurrahman, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, Bandung: Pustaka, 1985. h. 108-109.

45 Harun Nasution *op. cit.*, h. 154.

Gerakan kembali kepada agana ini memang dilakukan sebagai perisai, tetapi sebenarnya memberikan kesempatan bagi golongan ekstrim Islam untuk bangkit kembali sehingga pada akhirnya mempunyai peranan dalam bidang politik Islam. Semua ini terjadi mungkin karena partai Republik tidak mempunyai kekuatan untuk mempertahankan prinsip skularisasinya setelah Mustafa Kemal wafat pada tahun 1938.

3. Peradaban dan Ekonomi

Westernisasi dan sekularisasi juga dilakukan dalam bidang peradaban dan ekonomi. Dalam bidang peradaban, pada tahun 1925 pemakaian terbus dilarang dan diganti dengan topi Barat. Pakaian keagamaan juga dilarang, dan rakyat Turki harus mengenakan pakaian Barat, baik pria maupun wanita. Pada tahun 1931 dibuat keputusan bahwa azan harus dalam bahasa Turki, bukan bahasa Arab. Al-Qur'an harus diterjemahkan ke dalam bahasa Turki, agar dapat difahami rakyat Turki. Khutbah Jum'at juga harus diberikan dalam bahasa Turki. Pada tahun 1935 dikeluarkan pula undang-undang yang mewajibkan warga negara Turki mempunyai nama belakang. Hari cuti resmi mingguan diroboh dari hari Jumat menjadi hari

Minggu.⁴⁷ Corak musik yang beraliran Timur harus diganti dengan corak musik yang beraliran Barat⁴⁸ dan radio Turki harus menyiarkan lagu-lagu Barat.⁴⁹

Dari perubahan di atas, dapatlah dimengerti bahwa yang diinginkan Mustafa Kemal adalah Islam yang diturkikan dan tidak terikat oleh peradaban Timur (Arab). Peradaban Timur nampaknya dipandang oleh Mustafa Kemal bukan Islam. Baginya Islam adalah agama rasional yang sangat diperlukan bagi ummat manusia, dan ajarannya harus difahami rakyat Turki dengan tidak harus terbelenggu oleh tradisi ketimuran (kearaban). Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa Islam sebagai pedoman hidup rakyat Turki secara personal dan peradaban Barat sebagai acuannya.

Meskipun Turki banyak menyerap peradaban Barat, tetapi Mustafa Kemal membatasi diri untuk bekerja sama dengan Barat dalam bidang ekonomi. Ia tidak menginginkan negerinya dikuasai oleh kekuatan asing seperti yang pernah dialami pemerintahan Sultan. Sumber-sumber vital dalam negeri diambil alih oleh negara.⁵⁰ Untuk mengantisipasi resesi ekonomi dunia sebagai akibat Perang Dunia I, pihak penguasa Turki menerapkan beberapa kebijaksanaan ekonomi, antara lain

46 G.H. Jansen, *op. cit.*, h. 166.

47 Harun Nasution, *op. cit.*, h. 152-153.

48 F.R.C. Bagley (ed.), *The Muslim world a Historical Survey*, Leiden: E.J.Brill, 1981, h. 41.

49 G.H. Jansen, *op. cit.*, h. 161.

50 Edward Me Nall Burus, at. all, (ed.), *Western Civilizations*, vol 2. New York: W.W Norton & Company, Inc., 1980, h. 947.

mengurangi volume perdagangan luar negeri, menekan belanja rutin, mengurangi pengeluaran atau anggaran militer menjadi rata-rata 28 % dari seluruh anggaran pengeluaran, memberi bantuan kepada sektor swasta agar bisa lebih mandiri.⁵¹

Perbaikan-perbaikan di bidang ekonomi ini memang sangat menentukan bagi kelanjutan gerakan pembaharuan Mustafa Kemal, karena kalau tidak ada perbaikan dalam bidang ini, gerakan oposisi akan lebih mudah dalam mengacaukan situasi.

Sebagai akibat dari kebijaksanaannya, ekonomi Turki pada tahun 1949 sangat baik.⁵² Di sektor pertanian masyarakat Turki selalu mengalami surplus, sehingga kebutuhan pangan dalam negeri selalu terpenuhi.⁵³ Dengan demikian, Mustafa Kemal dapat mempertahankan kekuasaannya selama 15 tahun sekalipun banyak tantangan dari pihak oposisi.

III. PENUTUP

Mustafa Kemal, salah seorang tokoh pembaharuan Turki yang berkuasa selama 15 tahun. Ia bercita-cita ingin menjadikan Turki sebagai negara maju dan berperadaban Barat. Dalam mewujudkan cita-citanya itu, ia melakukan gerakan pembaharuan yang dibangun di atas dasar sekularisasi, westernisme, dan nasionalisme.

Sungguhpun gerakan pembaharuannya berdasar atas tiga prinsip dasar tersebut di atas, tetapi Mustafa Kemal tidak bermaksud menghilangkan agama Islam dari masyarakat Turki. Ia hanya menghendaki adanya pemisahan antara agama dan negara dan menjadikan agama Islam sebagai pedoman rakyat Turki secara personal dan peradaban Barat sebagai acuan-nya.

Namun, karena rasa keagamaan yang mendalam di kalangan rakyat Turki timbullah gerakan kembali kepada agama. Akhirnya agama berperan kembali dalam pemerintahan Turki.

51 Bernard Lewis, *op. cit.*, h. 201-202.

52 G.H. Jansen, *op. cit.*, h. 169.

53 Bernard Lewis, *loc. cit.*